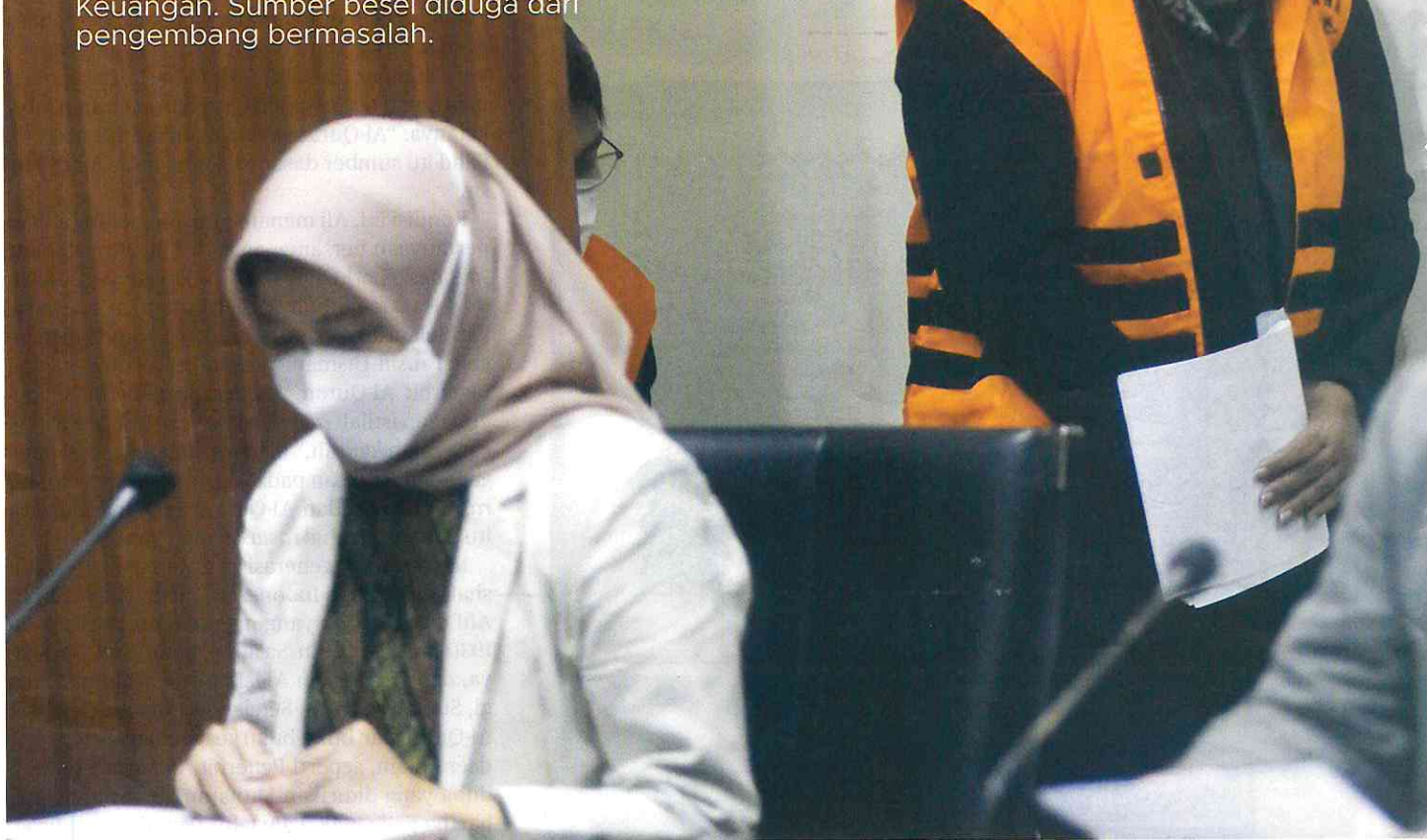


Bencana Suap Predikat WTP

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin dan anak buahnya karena diduga menyuap empat auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Sumber besel diduga dari pengembang bermasalah.



BUPATI Bogor Ade Munawaroh Yasin sedang tidur ketika satuan tugas Kedeputusan Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menyambangi rumah dinasnya di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu dinihari, 27 April lalu. Penjaga keamanan yang bersiaga di pintu gerbang mengantar tim KPK ke kamar Ade setelah surat tugas ditunjukkan. "Bu Bupati diminta ikut ke kantor KPK, katanya akan dimintai konfirmasi

dan keterangan," ucap salah satu penjaga rumah dinas yang meminta dipanggil Utar pada Kamis, 12 Mei lalu.

Ia tampak baru bangun tidur. Dengan raut wajah heran, Ade menanyakan apa yang terjadi dan kenapa dibawa ke gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.

Pegawai antikorupsi menjelaskan, mereka telah menangkap anak buah Ade serta pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. "Karena, sebagai pimpinan, Bupati akan dimintai ke-

terangannya atas perilaku bawahannya. Itu yang mereka sampaikan," ujar Utar.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bogor dan Bandung dari Selasa malam, 26 April, hingga Rabu subuh, 27 April lalu, KPK menciduk 12 orang, termasuk Ade. Namun hanya delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Ade beserta tiga anak buahnya, yakni Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maulana Adam, Kepala Sub-Bidang Kas Daerah Badan Pe-



pemenang tender juga buruk.

Mereka pernah tersandung perkara korupsi yang menjerat Gubernur Jambi Zumi Zola pada 2018. Bahkan salah satu petinggi perusahaan, LBM alias A, dicokok KPK pada awal tahun ini karena kedapatan menyuap Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendi sekitar Rp 4 miliar. "Sudah tahu terlibat kasus korupsi di Jambi, tapi masih dipilih sebagai pemenang. Diduga itu sengaja agar uang proyeknya dipakai bancakan," kata penegak hukum tersebut.

Guna menutupi kejanggalan realisasi proyek jalan, Ade melalui anak buahnya menagih setoran dari tiga pengurus perusahaan pemenang tender. Selain memberikan Rp 100 juta yang disetor di muka, anak buah Ade beberapa kali menyerahkan uang ratusan juta rupiah kepada para auditor.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor juga rutin mengirim Rp 10 juta kepada para auditor selama proses pemeriksaan. Uang itu ditengara di serahkan atas saran teman dekat Bupati Ade sebagai "uang bensin".

Penanganan kasus rasuah ini diperkirakan terus berkembang. Teman dekat Bupati Ade hingga kini belum diringkus KPK. Dari hasil penggeledahan di empat lokasi di Bogor, penyidik menemukan jejak percakapan elektronik dari teman dekat Bupati dengan Ihsan beserta uang dan dokumen.

Percakapan di sebuah aplikasi dari teman dekat Bupati Ade itu meminta Ihsan melaksanakan perintah Ade untuk mendapatkan opini WTP. Ihsan meneruskan pesan itu kepada Anthon, yang membalas: "Siap dikondisikan."

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali

Barang bukti uang untuk pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 agar memperoleh predikat "wajar tanpa pengecualian" di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 28 April 2022.

Fikri, mengatakan penyidik memang menyita sejumlah dokumen dan bukti percakapan dari aplikasi pesan. Menurut dia, penyidik juga sedang mendalami sumber besel. "Sedang kami kembangkan, termasuk sumber uangnya. Jadi belum bisa kami sampaikan," ucap Ali.

Selain berkongkalikong membuat opini WTP, Bupati Ade beserta jajarannya ditengetarai terlibat korupsi di salah satu badan usaha milik daerah. Ada juga perkara program Satu Miliar Satu Desa alias Samisade yang disebut merugikan negara.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Gurnadi Ridwan, menduga jual-beli opini tak hanya dilakukan untuk laporan keuangan 2021. Menurut dia, banyak temuan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pemeriksaan tahun anggaran 2020.

Tapi Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengantongi opini WTP pada tahun sebelumnya. Temuan itu di antaranya kekurangan volume fisik pada 21 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di Dinas PUPR. Uang deposito di kas daerah diperkirakan mengalami kurang penghitungan sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor kurang menerima bunga.

Ada pula kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dari belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana non-alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Ihwal penatausahaan dan pengamanan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai juga turut menjadi catatan.

Gurnadi mengatakan Bupati Ade, juga kepala daerah lain, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan opini WTP. Predikat ini digunakan sebagai alat memuluskan kepentingan, salah satunya untuk mendapatkan dana insentif daerah dari pemerintah pusat. "Status WTP juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kepemimpinan kepala daerah," tuturnya.

Agar kasus Ade dan jual-beli perkara opini lain tidak berulang, Gurnadi meminta BPK meningkatkan integritas para pegawai hingga pejabatnya. "BPK harus bersih-bersih di daerah ataupun pusat," ujarnya. Ia juga mendesak KPK meminta dan memantau BPK mengaudit ulang daerah-daerah yang berpotensi melakukan tindakan yang sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Selepas ditetapkan sebagai tersangka dan hendak dijebloskan ke rumah tahanan, Ade Yasin mengatakan merasa dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya. Ia berdalih tidak menginstruksikan anak buahnya menyuap pegawai BPK. "Saya dipaksa bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah. Sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab. Itu inisiatif mereka. Jadi ini namanya IMB: inisiatif membawa bencana," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat tersebut.

Ketua BPK Isma Yaton memastikan akan ikut menelusuri secara tuntas kasus dugaan suap dari Bupati Ade Yasin kepada pegawai BPK. "Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, demikian juga anggota staf pemeriksa untuk kasus terkait. Kami juga akan memproses semua pegawai yang diduga terlibat," ucap Isma.

Dia memastikan BPK akan terus mendukung upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme. BPK telah berkoordinasi dengan KPK terkait dengan peristiwa ini sehingga bisa menjadi pemberi efek jera atau *deterrent effect* bagi pelanggaran nilai-nilai BPK.

LINDA TRIANITA, M.A. MURTADHO (BOGOR)